

## ABSTRAK

Otonomi memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mendapatkan kewenangan menjamin daerahnya masing-masing, tak terkecuali di Desa. Otonomi yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan masyarakat seringkali terbentur dengan berbagai permasalahan yang menghambatnya. Hingga pada akhirnya kewenangan yang dijalankan menjadi kabur maknanya seiring usaha untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut dengan menghalalkan berbagai upaya atas nama rakyat. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sancang, Kabupaten Garut. Otonomi desa justru tanpa sadar menjadi ancaman yang tak kasat mata bagi kelestarian alam yang ada disana. Cagar alam Leuweung Sancang yang merupakan kawasan konservasi *in situ* dan membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaannya, nyatanya semakin hari alamnya tak lagi perawan. Konflik atas perbedaan kepentingan yang dijalankan oleh sekelompok pihak dengan pengelola cagar alam terus terjadi.

Dengan analisis kronologis, konflik-konflik ini mencuat begitu halus dari waktu ke waktu. Otonomi desa semestinya memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak bisa dicampuradukkan atau bahkan berbenturan dengan wilayah kewenangan pihak lain. Dalam hal ini, pemerintah Desa Sancang, masyarakat setempat dan pihak BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) memiliki keterikatan satu sama lain dalam hal kepentingan yang membutuhkan pemetaan lebih jelas terkait posisi masing-masing agar selaras mencapai tujuan yang diinginkan dengan tidak mengorbankan apapun, termasuk kelestarian alam.

**Kata kunci:** *Otonomi Desa, Konflik, Konservasi.*

## ABSTRACT

Autonomy provides a large enough space for regions to gain the authority to guarantee their respective regions, including villages. Autonomy which aims to fulfill people's welfare rights often collides with various problems that hinder it. Until in the end the meaning of the authority that is exercised becomes blurred in line with effort to realize this welfare by justifying various efforts on behalf of the people. Such is the case in Sancang Village, Garut Regency. Village autonomy is actually an invisible threat to the preservation of nature that is there. The Leuweung Sancang Nature Reserve, which is an *in situ* conservation area and requires special attention in its management, is in fact increasingly less virgin. Conflict over different interests run by a group of parties with the management of nature reserves continue to occur.

With chronological analysis, these conflict stick out so subtly from day by day. Village autonomy should have certain boundaries that cannot be mixed up or even clash with other parties areas of authority. In this case, the government of Sancang Village, the local community and BKSDA (Natural Resources Conservation Center) have an attachment to each other in term of interests that require clearer mapping of their respective position so that they are aligned in achieving the desired goals without sacrificing anything, including natural sustainability.

**Keywords:** *Village Autonomy, Conflict, Conservation.*